

## **ABSTRAK**

### **Tanggung Jawab Hukum Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta Otentik Terkait Adanya Tindak Pidana Pemalsuan**

Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan *Tax amnesty* atas jual beli tanah di Medan sudah diterapkan oleh notaris sesuai dengan prinsip hak ingkar notaris. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dijumpai oleh notaris didalam pelaksanaan *Tax amnesty* bagi jual beli tanah di Medan sesuai dengan prinsip hak ingkar notaris. Ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan notaris dalam mengatasi hambatan yang dijumpai oleh notaris dalam pelaksanaan *Tax amnesty* bagi jual beli tanah di Medan sesuai dengan prinsip hak ingkar notaris.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang relevan dengan masalah penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara pada narasumber terkait. Analisis data yang digunakan ialah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Pelaksanaan *Tax amnesty* atas jual beli tanah di Medan sudah diterapkan oleh notaris sesuai dengan prinsip hak ingkar notaris yaitu Penggunaan hak dan kewajiban ingkar notaris hanya dapat digunakan notaris semata mata demi kepentingan melindungi kerahasiaan penghadap, baik dari segi identitas para penghadap, maupun perbuatan hukum dari para penghadap yang termuat dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris tersebut. Namun pada prinsipnya hak ingkar notaris ini juga harus melewati dan atas persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebelum pada akhirnya notaris dapat memberikan keterangan atas tanah yang menyangkut pengguna jasa jual beli tanah di Kota Medan. Kedua, hambatan yang dijumpai oleh notaris didalam pelaksanaan *Tax amnesty* bagi jual beli tanah di Medan sesuai dengan prinsip hak ingkar notaris yaitu masih adanya beberapa notaris yang masih tidak jujur dan tidak berkoordinasi sama Ikatan Notaris Indonesia. Ketiga, Upaya yang dilakukan notaris dalam mengatasi hambatan yang dijumpai oleh notaris dalam pelaksanaan *Tax amnesty* bagi jual beli tanah di medan sesuai dengan prinsip hak ingkar notaris yaitu: pertama, perhatikan jenis-jenis akta, lindungi diri dengan surat pernyataan eksonerasi, perhatikan tanggal, setiap orang maksimal 5 bidang tanah, berhati-hati saat lakukan legalisasi, perhatikan aturan hukum lain dan jangan 'ceburkan diri' ke persoalan klien.

*Kata Kunci* : Hak Ingkar Notaris, Jual Beli Tanah, Peranan Notaris, *Tax Amnesty*.